

**KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial
Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

KARMILA
NIM. 50300113015

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karmila

NIM : 50300113015

Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, Bikeru 26 Maret 1996

Jurusan : PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jln. Rappokalling Timur No.8c Makassar

Judul Skripsi : Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten
Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain seluruhnya. Maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa, 27 Maret 2017

Penulis

Karmila
50300113015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

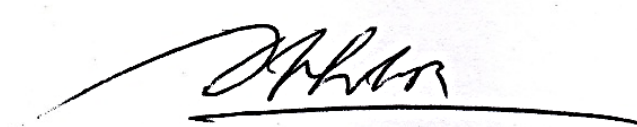
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☎ (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-Gowa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi seluruh isi skripsi dan hasil penelitian mahasiswa an. **Karmila NIM.50300113015** dengan judul "**Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa**",
Maka dengan ini kami menyatakan layak untuk diajukan ke *Seminar Hasil*.

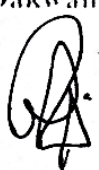
Pembimbing I


Drs.H.Syamsul Bahri, M.Si
NIP. 19581231 199403 1 007

Pembimbing II


Drs.H.Syakhrudin DN.,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bid. Administrasi Umum
Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Dr. H. Mahmuddin, M.Ag
NIP.19621217 198803 1 003

FDK BERMARTABAT

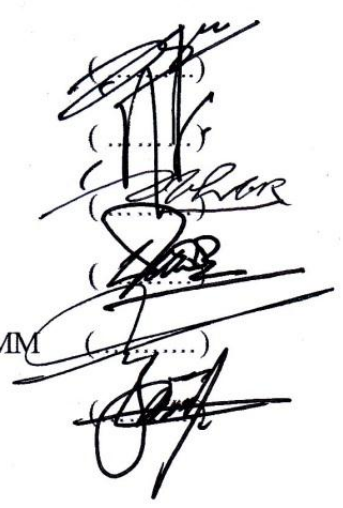
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, 'Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa'', yang disusun oleh Karmila, NIM: 50300113015, mahasiswa Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 03 April 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial.


Makassar 17 April 2017 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dra.ST Aisyah BM.,M.Sos.I
Sekretaris : Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag
Pembimbing I : Drs. H. Syamsul Bahri, M. Si
Pembimbing II : Drs H. Syakhruddin DN, M.Si
Munaqisy I : Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd.,M.Si.,MM
Munaqisy II : Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd.,M.Si.,MM
NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik, semoga limpahan rahmat dan hidayah-Nya selalu menyertai dalam lindungan-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad SAW., bershalawat kepadanya menjadi ungkapan terima kasih dan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas perjuangannya, sehingga nikmat Islam masih dapat di rasakan sampai saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak kendala dan cobaan yang dilalui. Meskipun diakui penyelesaian skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, baik dari segi teoretis, maupun dari pembahasan hasil penelitiannya. Namun, dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi pendorong sang penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga berkat adanya berbagai bantuan moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini. Selama menempuh studi maupun dalam proses perampungan dan penyelesaian skripsi ini, penulis tak lepas dari bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A, Wakil Rektor III Prof. Siti Aisyah, M.A.,Ph.D, Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Johanes, MA.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd.,M.Si.,M.M.
4. Wakil Dekan I Dr. Misbahuddin, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mahmuddin, M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I.
5. Ketua Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Dra. ST. Aisyah BM., M.Sos.I, Sekretaris Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd, dan Staf Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Suharyadi, S.HI, yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.
6. Pembimbing I Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si dan Pembimbing II Drs. H. Syakhrudin DN, M.Si yang dengan penuh kesabaran telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam perampungan skripsi ini.
7. Munaqisy I Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag.,M.Pd., M.,Si., M.M dan Munaqisy II Dr. Syamsuddin. AB, S.Ag., M.Pd yang dengan penuh kesabaran telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan kritik, saran, arahan, dan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam perampungan skripsi ini.

8. Seluruh dosen serta seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang layak dan berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
9. Ibunda Rabiah dan Ayahanda Abd. Azis, kedua orang tua yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dengan buaian kasih sayang kepada penulis, serta senantiasa menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi
10. Teman seperjuangan angkatan 2013 dan sahabat Nasrida Umar, Rezky Nurfajrianti Wahab, Nur Ayu, Enjelia, Jumiati, Milani Mustapa, dan amalia, yang tetap setia memberi semangat dan motivasi mulai dari semester satu sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Gowa selaku informan dalam penelitian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalam.

Makassar, 25 Maret 2017
Penulis

Karmila
50300113015

DAFTAR ISI

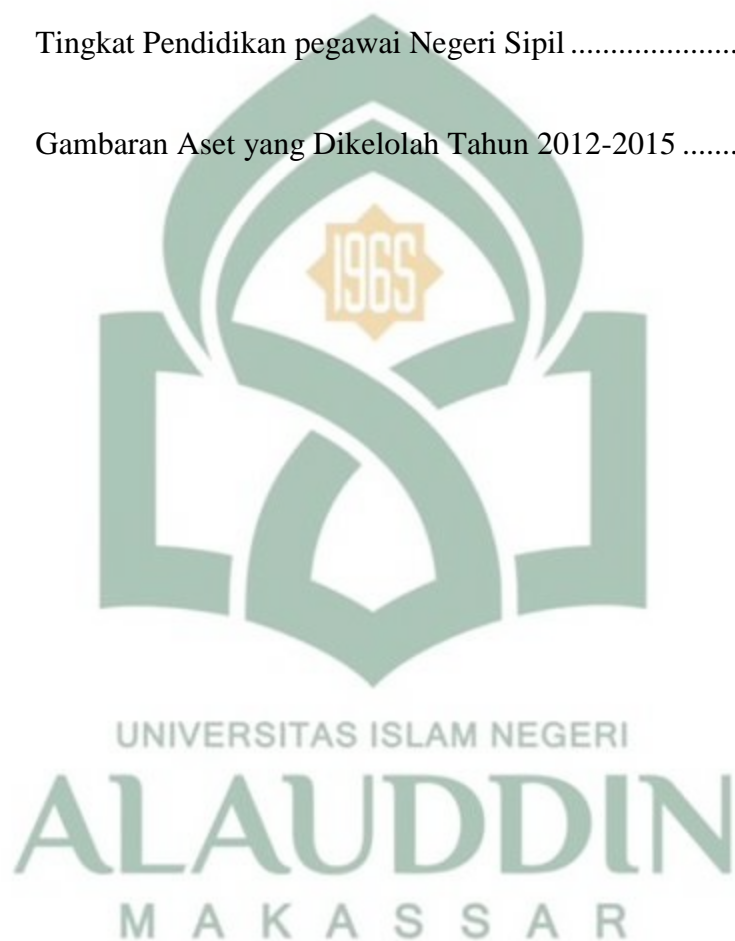
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12-33
A. Tinjauan Tentang Kesiapsiagaan	12
B. Pengertian Bencana	14
C. Tahap Penanggulangan Bencana	21
D. Pengertian Bencana Banjir	26
E. Metode Dan Teknik Penanggulangan Bencana Banjir	30
F. Pandangan Islam Terhadap Pelestarian Alam	32
BAB III METODE PENELITIAN	34-41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42-65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	54
C. Upaya (BPBD) Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa	56

D. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal BPBD Dalam Penanggulanagn Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa	62
BAB V PENUTUP.....	66-67
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Data Penduduk Kabupaten Gowa.....	48
Tabel 4. 2	Perkembangan Dan Kualitas Pegawai	49
Tabel 4. 3	Tingkat Pendidikan pegawai Negeri Sipil	50
Tabel 4. 4	Gambaran Aset yang Dikelolah Tahun 2012-2015	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Gowa.....	47
-------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berlokasi di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bahaya alam, yaitu bencana geologi (gempa, gunung api, longsor, tsunami) dan hidro meteorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar dan sebagainya). Kejadian bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan diikuti tanah longsor. Kondisi morfologi di Indonesia yaitu relief bentang alam yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan selalu terjadinya banjir di Indonesia di setiap musim penghujan. Banjir umumnya terjadi di Wilayah Indonesia Bagian Barat yang menerima curah hujan yang lebih banyak dibandingkan dengan Wilayah Indonesia Bagian Timur.¹

Faktor kondisi alam tersebut diperparah oleh meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir secara tidak langsung. Tingkahlaku manusia yang tidak menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penebangan hutan yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah suatu wilayah sungai. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Indonesia setiap tahunnya terbukti menimbulkan dampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi.

¹ <http://www.slideshare.net/DwinaAvianindya/makalah-Kesiapsiagaan-banjir>.

Potensi penyebab bencana di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Sementara nonalam antara lain yang disebutkan ialah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri ledakan nuklir dan pencemaran lingkungan. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.²

Bencana banjir hampir terjadi setiap musim hujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kerja dan bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Bencana banjir sudah menjadi isu nasional yang seakan tidak dapat diatasi lagi. Bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Upaya pengurangan dampak bencana yang dilakukan oleh pemerintah masih terfokus pada kebijakan struktural saja.

Selain itu bentuk kepedulian dan upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang

² Departemen Sosial RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 40.

Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008.³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tersebut juga telah membahas tentang kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Badan/Satuan/Unit Penanggulangan Bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yaitu pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kesiapsiagaan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian penyuluhan dan geladi lapang tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana serta penyediaan dan penyiapan bahan barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.⁴

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

³ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 58.

⁴ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 25.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Untuk itu pemerintah perlu menanamkan atau melakukan pemahaman dan pembelajaran melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang cara penanggulangan bencana banjir. Oleh karena itu, pengamatan penulis pada instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gowa ditemukan data tentang permasalahan banjir di Kabupaten Gowa.

Berbagai bencana yang sering terjadi di Kabupaten Gowa diantaranya tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Hujan yang terus menerus di hulu berdampak pada terjadinya bencana banjir. Sehingga pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melakukan kegiatan antisipasi banjir.

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16° bujur Timur dari Jakarta dan 5°33'6° bujur Timur dan kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19° hingga 13°15'17° bujur Timur dan 5°5° hingga 5°34'7° lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan tujuh Kabupaten/Kota lain, yaitu diantaranya di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan kabupaten Maros.

⁵ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 40.

Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Disebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Jennepono, sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 (Sembilan) Kecamatan yakni Kecamatan parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar dan meliputi 9 (Sembilan) Kecamatan yakni Kecamatan Sombaopu, Bontomarannu, Pattalassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan. Luas wilayah kabupaten Gowa adalah 1.883.33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.⁶

Kabupaten Gowa memiliki dua dataran yang berbeda yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Adanya dua dataran yang berbeda sehingga sering menimbulkan bencana di antaranya yaitu banjir. Bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Gowa yaitu banjir yang diakibatkan hujan lebat sehingga menyebabkan kerugian terhadap warga kabupaten Gowa. Daerah yang paling rawan banjir yang terdapat di Kabupaten Gowa. Sesuai dengan data yang ditemukan di instansi BPBD Kabupaten Gowa bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Gowa mengalami bencana banjir karena hujan lebat dan menyebabkan rumah

⁶ Arsip BPBD Kabupaten Gowa

warga terendam banjir sebanyak 321 unit. Dan pada tahun 2014 kembali terjadi bencana banjir di Kabupaten Gowa dengan jumlah rumah rusak sedang 3 (tiga) dan rumah rusak parah 2 (dua).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan “Bagaimana kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap bencana banjir di Kabupaten Gowa” dengan beberapa submasalah:

1. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat internal dan eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penulisan agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu, penulis memfokuskan penulisan mengenai BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Gowa.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan atau substansi pendekatan, kesiapsiagaan BPBD terhadap

bencana banjir di Kabupaten Gowa. Agar menghindari kesalahpahaman tentang judul dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan deskripsi fokus sebagai berikut:

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.⁷ Jadi yang dimaksud kesiapsiagaan dalam penelitian ini adalah tindakan apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya bencana banjir.

b. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

BPBD adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.⁸

c. Banjir

Banjir merupakan suatu kejadian yang terjadi di Kabupaten Gowa yang diakibatkan karena hujan lebat yang terus-menerus mengguyur Kabupaten Gowa

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kesiapsiagaan BPBD terhadap bencana banjir bukan pertama kali diteliti, bahkan secara umum buku-buku, tulisan dan komentar

⁷ Kementerian Sosial R.I, *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*, (Cet. 1; Jakarta, 2011), h. 7.

⁸ [Http://bpbd.pemkomedan.go.id/statis-7-tugas-dan-fungsi.html](http://bpbd.pemkomedan.go.id/statis-7-tugas-dan-fungsi.html)

membahas tentang kesiapsiagaan BPBD terhadap korban bencana banjir. Berikut ini merupakan sumber bacaan dan informasi, sebagai berikut;

1. Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas

Kementerian Sosial dalam bukunya Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana pada cetakan ke I tahun 2011 menjelaskan tentang Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (PBBK) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal.⁹ Tujuan penanggulangan bencana berbasis komunitas (PBBK) yaitu;

- a. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, terutama pada daerah-daerah rawan bencana
- b. Memperkenalkan cara membuat peta bahaya setempat
- c. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait
- d. Mengembangkan organisasi bencana di daerah
- e. Mempertinggi kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup
- f. Membina kemampuan masyarakat yang mandiri
- g. Memperkaya pengetahuan masyarakat dengan pendidikan tentang bencana.¹⁰

2. Penanggulangan Bencana

Departemen Sosial Republik Indonesia dalam bukunya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 yaitu penanggulangan bencana

⁹Kementerian Sosial RI, *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*. h. 17.

¹⁰ Kementerian Sosial RI, *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*. h. 18.

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.¹¹ Dalam pasal 4 mengatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- c. Menghargai budaya lokal
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermwanaan.
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹²

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang penulis lakukan di lapangan, penulis hanya menemukan beberapa skripsi yang hampir sama dengan judul penulis yang dilakukan yaitu:

1. “Tri Puspita Sari, 2013. “Kesiapsiagaan masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelituian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari responden dengan melakukan wawancara sehingga bisa mendapatkan hasil wawancara. Pada penelitian ini, ditemukan hasil penelitian bahwa upaya masyarakat dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Desa panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulanagan bencana alam sudah berjalan dengan lancar, namun belum terlalu maksimal. Bentuk program yang ada di Desa tersebut adalah Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun faktor yang penunjang dalam menanggulanagi bencana yaitu terdapatnya system sumber formal maupun informal serta system sumber kemasyarakatan yang siap dan

¹¹ Kementerian Sosial RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. h. 3.

¹² Kementerian Sosial RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. h. 7.

bersedia untuk dalam memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.”

2. “Dodonyamin, Indikator Dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat Di Permukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir”, 2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan dan hubungan antar faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya bencana lebih rendah dibandingkan kesiapsiagaan masyarakat saat bencana dan setelah bencana. Dalam hal ini masyarakat lebih memiliki kesiapsiagaan dalam darurat bencana.”
3. “Abdul Latief, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Daerah”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu kualitatif deskriptif. Jenis penelitian dalam pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan data primer dan data sekunder. penelitian ini membahas mengenai hubungan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana banjir yang ada di Kota palopo.”

Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis terfokus pada Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penulisan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kesiapsiagaan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi tantangan yang dialami BPBD dalam penanggulangan bencana banjir.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap penanggulangan bencana banjir.
- 2) Kegunaan bagi masyarakat dan pemerintah yang ada di Kabupaten Gowa dalam memberikan pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam, khususnya bagi bencana banjir.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi penulis penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk menambah wawasan berfikir serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan
- 2) Bagi masyarakat Kabupaten Gowa dapat dijadikan pedoman dalam penanggulangan bencana banjir
- 3) Bagi pemerintah BPBD Kabupaten Gowa, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi bencana banjir.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Tentang Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.¹

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna yaitu:

1. Rencana kontinjensi yaitu suatu rencana kedepan dalam situasi yang belum pasti, dimana skenario dan sasaran sudah disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan dan rencana tanggapan disusun.
2. Sistem peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
3. Rencana kesiapan yaitu merencanakan dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa sumberdaya yang diperlukan akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat yang sudah diperkirakan sebelumnya dan bahwa ada kapasitas untuk menggunakan sumberdaya

¹ Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, h. 4.

tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan masyarakat dan perorangan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi situasi bencana secara cepat dan efektif, yaitu;

- a. Tujuan kesiapan bencana adalah untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu bahaya lewat tindakan-tindakan berjaga yang efektif dan untuk menjamin secara tepat, organisasi yang tepat dan efisien serta pengiriman respon emergensi yang menindaklanjuti dampak dari satu bencana.
- b. Komponen-komponen kesiapan bencana terdapat beberapa komponen utama yang tercakup dalam kesiapan bencana yaitu;

Perencanaan, melalui semua aktivitas yang dirancang untuk mempromosikan kesiapan bencana, tujuan yang paling utama adalah mempunyai rencana-rencana yang siap yang sudah disepakati yang dapat diimplementasikan dan untuk menciptakan komitmen dengan berdasarkan sumber-sumber daya yang relatif terjamin.

- 1) Kerangka kerja institusi, kesiapan bencana yang terkoordinir dan sistem tanggapan adalah satu prasyarat terhadap setiap rencana kesiapan bencana.
- 2) Pelatihan dan pelatihan umum, bagian penting dari rencana kesiapan bencana adalah pendidikan untuk mereka yang mungkin terancam oleh bencana.
- 3) Struktur pemerintahan untuk peringatan dan tanggapan emergensi.²

² Kementerian Sosial R.I, *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*, (Cet. I; Jakarta, 2011), h. 7.

B. Pengertian Bencana

Pengertian atau definisi tentang bencana pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana.³

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 yaitu: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁴

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.⁵

- 1) Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, banjir disebabkan volume air di suatu badan air seperti sungai dan danau meluap karena curah hujan yang tinggi dan tidak lancarnya jalan air yang dikarenakan oleh sampah-sampah
- 2) Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi.

³ Nurjannah, dkk, *Manajemen Bencana*. h. 10.

⁴ Kementerian Sosial RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. h. 2.

⁵ Kementerian Sosial RI, *Himpunan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial*. h. 2.

- 3) Angin topang adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit.
- 4) Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dengan berbagai tipe dengan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemis dan wabah penyakit.⁶

- 1) Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan industry.
- 2) Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyakit menular yang berjangkik di daerah tertentu. Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia yang masih harus di waspadai antara lain demam berdarah, malaria, flu burung, busung lapar dan HIV/AIDS.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial atau kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.⁷

⁶ Kementerian Sosial RI, *Himpunan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial*. h. 2.

⁷ Kementerian Sosial RI, *Himpunan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial*. h. 2.

- 1) Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
- 2) Konflik sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak
- 3) tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang di picu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya di kemas sebagai pertentangan antar suku, ras dan agama.

Adapun definisi bencana dari *United Nations International Strategy For Disaster Reduction* (UN-ISDR), dapat digenerasikan bahwa untuk dapat disebut bencana harus di penuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut;

- a. Ada peristiwa
- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia
- c. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi akan terjadi secara perlahan-lahan atau bertahap
- d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain-lain.
- e. Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.⁸

⁸ Nurjannah, dkk, *Manajemen Bencana*. h. 11.

1. Jenis-Jenis Bencana

Pada umumnya jenis bencana dikelompokkan kedalam enam kelompok yaitu sebagai berikut;

- a. Bencana geologi
- b. Bencana biologi
- c. Bencana sosial
- d. Bencana lingkungan
- e. Bencana kegagalan teknologi
- f. Bencana hydro-meteorologi

Kedaruratan kompleks yang merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.⁹

2. Faktor-faktor Bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu;

- a. Faktor alam (*Natural Disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- b. Faktor nonalam (*Non Natural Disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial manusia (*Man Made Disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal dan terorisme.¹⁰

⁹ Nurjannah, dkk, *Manajemen Bencana*. h. 20.

¹⁰ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, (Jakarta : Pusat Penyuluhan Sosial, 2007), h. 3.

3. Pengertian Rawan Bencana

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik terjadinya akibat kondisi geografis, geologis, demografis. Maupun akibat karena ulah manusia. Daerah rawan bencana terdiri atas:¹¹

- a. Kawasan rawan tanah longsor
- b. Kawasan rawan gelombang pasang
- c. Kawasan rawan banjir

Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik, dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari perspektif dari pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama dalam tahap bencana. Respons merupakan hal penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal.¹²

Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada di dunia yang sering terjadi bencana alam. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, sehingga dilalui oleh badai tropis alhasil Indonesia rentan terhadap bencana. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan tanah longsor. Adanya pembangunan yang ada

¹¹ IdTesis, Pengertian dan Faktor Penyebab Rawan Bencana, <https://idtesis.com/pengertian-dan-faktor-penyebab-daerah-rawan-bencana/> (Diakses Tanggal 13 November 2016).

¹² Abdul Latief, Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Palopo, *Skripsi*. (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 22.

selama ini jarang sekali memperhatikan pembangunan berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung mampu merusak potensi alam yang ada.

4. Macam-Macam Kawasan Rawan Bencana

Seringkali terjadi bencana di Indonesia ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana karakteristik wilayah yang rawan terjadi bencana, berikut ini macam-macam daerah yang rawan terjadinya bencana beserta contoh yang ditimbulkannya.¹³

a. Kawasan Perbukitan

Daerah perbukitan memiliki kemiringan lereng yang agak landai dimana daerah perbukitan ini biasanya bencana yang sering terjadi antara lain, kebakaran, tanah longsor, gempa, dan letusan gunung api.

b. Kawasan Dataran

Secara periodik bentuk lahan dataran digenangi oleh banjir karena luapan sungai didekatnya atau dari akumulasi aliran permukaan bebas maupun hujan lokal, topografi landai dengan elevasi yang rendah selain itu letaknya juga di kiri dan kanan sebagai akibat dari luapan air sungai secara periodik dan sedimen yang terangkut dalam jumlah yang besar diendapkan, akibatnya secara berangsur bertambah tinggi dan lebar dengan demikian ini dapat menjadi indikator bahwa daerah sekitar rentan terhadap banjir.

¹³ Yandragautama, *Analisis Rawan Bencana*, h. 15.

c. Kawasan pesisir pantai

Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan yang terletak dengan pesisir pantai yang dipengaruhi oleh pasang naik air laut sehingga daerah ini sangat mudah untuk terjadi genangan air. Wilayah pesisir/pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut yang meluas ke arah daratan hingga batas pengaruh marin masih dirasakan. Dan bencana yang lebih dominan terjadi pada daerah ini seperti tsunami setelah gempa, gelombang pasang/badai, abrasi air laut, dan banjir.

Adapun faktor-faktor penyebab daerah rawan bencana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana karakteristik wilayah yang rawan bencana.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah di sungai.
- c. Meningkatnya jumlah penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat juga penggunaan lahan pemukiman sehingga banyak lahan resapan air berkurang dan akibatnya sering terjadi banjir di daerah dataran dan longsor pada daerah lereng.
- d. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam upaya pemeliharaan kelestarian alam, seperti terjadinya penyuapan oleh para pelaku penyelundupan kayu kepada oknum yang terkait.

5. *Manajemen Bencana*

Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada prinsip: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan dan keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

C. *Tahap Penanggulangan Bencana*

1. Tahap Prabencana

a. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.¹⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 46 Ayat 2 dilakukan melalui:

- 1) Pengamatan gejala bencana
- 2) Analisis hasil pengamatan gejala bencana

¹⁴ Annisa Kurnia Shaliha, *Pola adaptasi Masyarakat terhadap Banjir di Masyarakat, Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015) h. 19.

¹⁵ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h.20

¹⁶ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 3.

- 3) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
- 4) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana
- 5) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.¹⁷

b. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting, namun mudah dilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu;

- 1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedarurat bencana
- 2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- 4) Penyiapan lokasi evakuasi
- 5) Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana

¹⁷ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 25.

¹⁸ Kementerian Sosial R.I, *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam*, h. 4.

- 6) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan bahan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

c. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan struktural

Mitigasi struktural adalah bentuk mitigasi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam mengurangi dampak negatif banjir. Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya, membuat rancangan atau desain yang kokoh, dan membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.¹⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 47 ayat 1 yaitu:

- 1) Pelaksanaan penata ruang
- 2) Peraturan pembanguna, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan

¹⁹ Sekretariat Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasi di Indonesia, h. 3.

- 3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.²⁰

2. Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi.

3. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.²¹

4. Tanggap Darurat Bencana

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana.

²⁰ Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 26.

²¹ Annisa Kurnia Shalihat, *Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir di Masyarakat perumahan Genuk Indah Kota Semarang*. Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015), h. 22-25.

Sedangkan tanggap darurat yaitu kegiatan memobilisasi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengkonsolidasi diri melalui penyediaan sarana dan prasarana korban bencana alam.²²

5. Pasca Bencana

Setelah terjadinya bencana dan selesainya masa tanggap darurat, diharapkan korban bencana atau pengungsi kembali ke rumah/ tempat asal di mana mereka tinggal. Dalam hal memungkinkan tidak bisa kembali, bisa ditempuh jalan lain misalnya melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun nonfisik.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.²³

Pada Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimaksud;

1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a) Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b) Perbaikan sarana dan prasarana umum
 - c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

²² Departemen Sosial RI, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2003), h. 125.

²³ Kementerian Sosial RI, *Himpunan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial*, h. 25.

- d) Pemulihan psikologi sosial
- e) Pelayanan kesehatan
- f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g) Pemulihan sosial dan ekonomi budaya
- h) Pemulihan keamanan dan ketertiban
- i) Pemulihan fungsi pemerintahan
- j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.²⁴

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.²⁵

D. Pengertian Bencana Banjir

Bencana Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir merupakan bencana alam yang ke tiga terbesar di dunia yang telah banyak menelan korban jiwa dan kerugian harta benda. Faktor alam yang

²⁴ Kementrian Sosial RI, *Himpunan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial*, h. 25.

²⁵ Departemen Sosial RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, h. 29.

dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah karena curah hujan yang tinggi. Selain itu juga banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan akibat peluapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai. Namun banjir juga sering terjadi dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan ke dalam saluran air. Selokan dan sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal, sehingga aliran air terhambat dan menjadi tergenang. Banjir juga dapat disebabkan karena tidak adanya saluran air di beberapa jalan raya, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang di jalan yang lama-kelamaan akan menghancurkan aspal jalan.

Hal lain yang dapat menyebabkan banjir adalah karena ulah penebangan pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air menjadi sangat sedikit.²⁶ Jadi, dari beberapa pembahasan banjir di atas, dapat disimpulkan bahwa banjir adalah naiknya permukaan air akibat hujan yang terus menerus yang disebabkan oleh tingginya permukaan volume sungai dan menimbulkan kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis.

Menurut Dibyosaputro, banjir merupakan satu bahaya alam yang terjadi di alam ini di mana air menggenang di lahan rendah di sekitar sungau sebagai akibat ketidak mampuan alur sungai menampung dan mengalirkan air, sehingga meluap melampaui tanggul dan mengenai daerah sekitarnya.

²⁶ Aminudin, *Siapa Siapa Menghadapi Bencana Alam*, (Cet; 3, Bandung, 2013) h. 27.

1. Faktor-Faktor Penyebab Banjir

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak dapat menampung akumulasi air hujan sehingga meluap di permukaan atau daratan.

Pada daerah permukiman yang padat penduduknya atau bangunan sehingga mengakibatkan tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang. Pada curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Adapun Penyebab timbulnya banjir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu;

a. Pengaruh aktifitas manusia

- 1) Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk pemukiman dan industri
- 2) Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan pelarian tanah permukaan
- 3) Permukiman di dataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan baik
- 4) Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air terutama di perumahan-perumahan.

b. Kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti:

- 1) Kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau siklon
- 2) Kondisi topografi yang cekung merupakan dataran banjir
- 3) Kondisi alur sungai, seperti kemiringan dasar sungai datar, berkelok-kelok, timbulnya sumbatan atau berbentuk seperti botol dan adanya sedimentasi sungai membentuk sebuah pulau (ambal sungai)

c. Peristiwa alam yang bersifat dinamis

- 1) Curah hujan yang tinggi
- 2) Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar
- 3) Penurunan muka tanah atau amblesan
- 4) Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi.

2. Dampak Banjir

Dampak banjir akan terjadi pada beberapa aspek dengan tingkat kerusakan berat pada aspek-aspek berikut ini:

- a. Aspek penduduk antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah penyakit dan penduduk terisolasi.
- b. Aspek pemerintahan, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan, perlengkapan kantor dan terganggunya jalannya pemerintahan.

- c. Aspek ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan, hilangnya harta benda dan terganggunya perekonomian masyarakat.
- d. Aspek sarana/prasarana, antara lain berupa kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.²⁷

E. Metode dan Teknik Pendampingan Sosial Penanggulangan Bencana Banjir

1. Metode Pendampingan Sosial bagi Bencana Banjir

- a. Metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga (*case work*) bertujuan untuk membantu individu-individu pengungsi korban bencana secara perorangan, untuk mengatasi masalah-masalah personal dan sosial. Metode ini dilakukan dengan didasari oleh suatu proses relasi yang bersifat individual, tatap muka antara pendamping dan korban bencana alam.
- b. Metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*group work*) digunakan untuk menangani masalah-masalah individual melalui kelompok, dan mengembangkan kelompok itu sendiri.
- c. Metode pekerjaan sosial dengan masyarakat/ organisasi (*Community Organaization /Community Development*) digunakan dengan mengorganisasikan masyarakat. Metode ini merupakan proses menstimulasi

²⁷ Widiyany Nurrahmah, *Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Banjir*, (Cet;1, Jakarta 2015) h. 20.

dan membantu masyarakat lokal, termasuk masyarakat korban bencana alam untuk mengevaluasi, merencanakan, dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2. Teknik-Teknik Pendampingan Bagi Pengungsi Korban Bencana Banjir

Sesuai dengan metode mana yang akan diterapkan dalam melakukan pendampingan terhadap pengungsi korban bencana alam, beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami korban bencana adalah sebagai berikut:

- a. Konseling yaitu suatu proses antar pribadi antara pendamping dengan korban bencana/ klien untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan klien dalam menemukan dan mengatasi masalahnya.
- b. Intervensi krisis yaitu intervensi yang bertujuan untuk memberikan sebanyak mungkin dukungan dan bantuan kepada individu korban bencana dan keluarganya agar mereka mendapatkan kembali keseimbangan psikologi secepat mungkin.
- c. Terapi kelompok yaitu inti dari praktek *social group work*. Terapi kelompok bertujuan untuk memudahkan penyesuaian diri secara sosial dan emosional bagi individu-individu melalui proses kelompok.
- d. Advokasi sosial, tindakan untuk mewakili atau membela kepentingan korban bencana alam baik melalui penanganan langsung atau melalui pemberdayaan dengan tujuan untuk menjamin atau mencapai keadaan korban bencana alam yang sejahtera.

- e. Bimbingan sosial adalah rangkaian kegiatan terencana, terarah, terstruktur dan sistematis untuk membimbing dan memberikan arah kepada korban bencana dalam meningkatkan kemampuan, motivasi dan peranannya dalam rangka memperkuat keberfungsian sosialnya.²⁸

F. Pandangan Islam Terhadap Kepedulian Sesama Pelestarian Alam

Banjir kini mulai terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Tak ada yang dapat mengelak dari bencana yang satu ini. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai banjir. Dalam kitab umat Islam inilah sudah jelas mengenai penyebab mengapa terjadi banjir. Bahkan sebelum para ilmuwan menemukan penyebab dari banjir tersebut.

Di dalam Al-Qur'an banjir pernah menelan korban jiwa kaum 'Ad, Negeri Saba' dan kaumnya Nabi Nuh. Peristiwa ini dapat kita telaah dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS Al-Ankabut/29: 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka Dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun, kemudian mereka dilanda banjir besar”.²⁹

²⁸ Kementerian Sosial R.I, *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*.
h, 24

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Secara teologis, awal timbulnya banjir tersebut karena pembangkangan umat manusia pada ajaran Tuhan yang coba disampaikan para Nabi. Namun, secara ekologis, bencana tersebut dapat diakibatkan ketidakseimbangan dan diserojntasi manusia ketika memperlakukan alam sekitar.

Dalam Neoteologi, banjir bukanlah sekedar musibah kemurkaan Allah kepada umat manusia. Akan tetapi banjir juga bisa merupakan fenomena ekologis yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam mengelola lingkungan, menentang sunnah lingkungan.

Dalam mengatasi solusinya pun, di dalam Al-Qur`an telah dijelaskan. Allah memerintahkan kepada kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Al-A`raf/ 07: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ... ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakannya) dengan baik.”³⁰

Ayat tersebut, diperintahkan kepada manusia tentu yang baru menyadarinya. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur`an. Oleh karena itu, dekatkanlah selalu diri kita kepada Allah. Jadikanlah Al-Qur`an sebagai pedoman hidup karena di dalam Al-Qur`an semua permasalahan dunia maupun akhirat sudah dijelaskan. Sehingga kita tidak perlu menunggu para ahli untuk memecahkan suatu masalah karena melakukan kesalahan, mereka hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara konsektual melalui pengumpulan data yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendiskripsikannya.

Alasan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut juga karena penelitian ingin mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna tentang permasalahan penelitian.

¹Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya 2007), h.23

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa. Penentuan lokasi di atas dikarenakan belum pernah diadakan penelitian yang bersinggungan dengan Kesiapsiagaan BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang di teliti sesuai dengan lokasi objek penelitian itu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Sosiologi

Kehidupan dalam masyarakat sangat elastis dan rentan terhadap berbagai perubahan yang ada, baik yang sifatnya yang terencana maupun yang tidak terencana. Selain itu, pendekatan sosiologi ini dimaksud bahwa kesiapsiagaan BPBD terhadap bencana banjir menjadi gerak perubahan sosial di masyarakat untuk di Kabupaten Gowa.

2. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi melalui metode kesejahteraan sosial yaitu upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau relawan, upaya amal dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang dan energi untuk membantu orang lain memenuhi bagaimana upaya masyarakat kabupaten Gowa

dalam mengantisipasi terjadinya bencana banjir, dan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tanpa menunggu bantuan dari pemerintah yang bersangkutan jika terjadi bencana banjir.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian skripsi ini terdiri atas dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu Sumber data yang di peroleh penulis di lapangan bersama informan baik berupa wawancara maupun observasi langsung yaitu di instansi BPBD Kabupaten Gowa. Adapun data primer adalah ketua kesiapsiagaan dan Pencegahan, kepala seksi bidang pencegahan, dan sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data primer, dokumentasi, dan dokumen lain yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data sekunder adalah buku yang membahas tentang kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, dan tahap penanggulangan bencana banjir.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data yang diperoleh secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengelolah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.²

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi menjadi salah satu tekhnis pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan di catat secara sistematis.³

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya. Oleh karena itu, observasi kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (mata).⁴

Metode observasi yang akan digunakan penulis yakni dengan pengamatan lingkungan lembaga yang akan di teliti yaitu tentang Kesiapsiagaan BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Gowa.

² Usman Jasad, *Dakwah dan Komunikasi Transformatif* (Cet. 1: Makassar: Alauddyn University Press, 2011), h. 177.

³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.1:Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008). h. 52.

⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 115.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan, dan jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.⁵

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap langsung dengan informan, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang di teliti.⁶

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan dapat di percaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis.⁷

Wawancara digunakan untuk memperoleh suatu data, sehingga wawancara tersebut dapat memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui bagaimana kesiapsiagaan BPBD terhadap penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa.

⁵Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 67-68.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet: 8, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 157.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pendukung dalam proses pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau literatur dan bahan-bahan yang tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁸

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian.

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang digunakan, oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; observasi, wawancara (*interview*) dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan kamera, alat perekam dan buku catatan.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h.10.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data yang menjadi obyek penulis, namun juga merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai:

1. Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sarana selanjutnya (informasi, situasi, dan dokumen).
2. Reduksi data, dalam proses ini penulis dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.

3. Penyajian data, yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat Nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga penanggulangan bencana sebelumnya, yakni Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai komando dan koordinasinya di daerah di bubarkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh pemerintah pusat (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) yang kedudukannya merupakan lembaga pemerintah Non Departemen setingkat Menteri (pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sementara itu Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh pemerintah Daerah (pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh pejabat setingkat dibawa Gubernur atau setingkat

eselon I-b dan di tingkat Kabupaten/Kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon II-a.

Pejabat setingkat eselon I-b di tingkat Provinsi dan pejabat setingkat eselon II-a ditingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah (sekda).

Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (pasal 20 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007).

Sementara itu tugas-tugas BPBD ada Sembilan buah 9 (pasal 21 UU No. 24 Tahun 2007), yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai aturan perundang-undangan (dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf I perda No 25 Tahun 2011))

Secara teknis pembentukan BPBD di atur dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Perkara (Perka) BNPB No 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan meski mengikuti tata aturan dari kementerian dalam Negeri. Disini perangkat daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor Non alam maupun faktor manusia

yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda sehingga membutuhkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melalui peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25, tanggal 11 juli 2011). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa beserta sekretariat unsur pelaksanaannya efektif terbentuk sejak februari 2012.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dan peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi *leading sector* penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa membawahi unsur pengarah

yang dipimpin oleh ketua harian (Eselon II-b) dan unsur-unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana (Eselon II-b) yang mempunyai sekretariat.

2. Visi Dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Gowa

a. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa

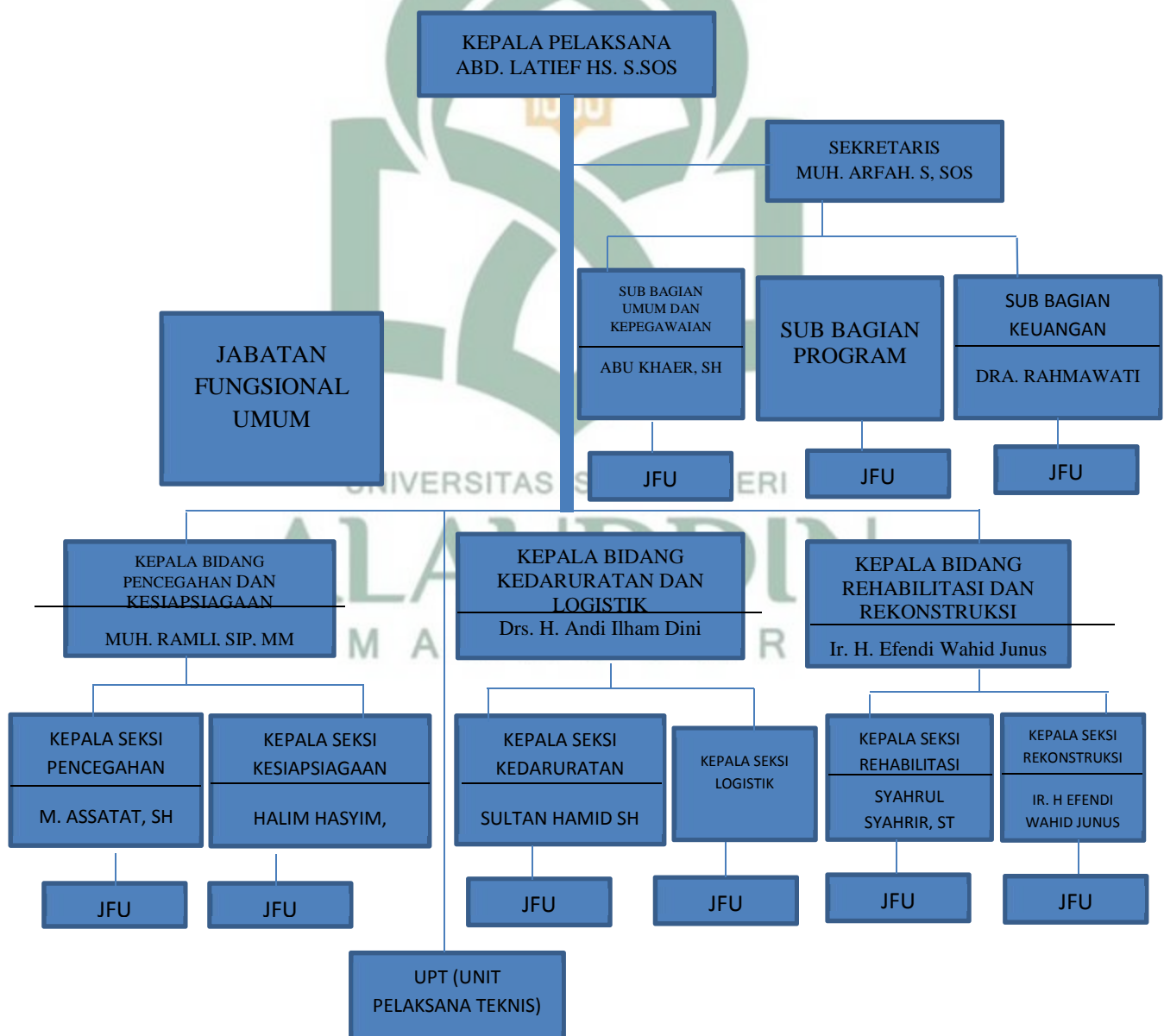
“Terwujudnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang Tangguh dan Berkualitas dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Gowa

b. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

- Meningkatkan SDM, moral, mental dan keterampilan staf BPBD dalam penanggulangan bencana
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana
- Meningkatkan, menguatkan kelembagaan BPBD serta melibatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang resiko bencana melalui Desa Tangguh
- Mengoptimalkan potensi, kemampuan sumber daya yang dimiliki

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gow



Gambaran perkembangan Sumber Daya BPBD Gowa, selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 4. I
Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Pada tahun 2015

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BONTONOMPO	19.814	21.688	41.502
2	BONTONOMPO SELATAN	14.237	15.389	29.626
3	BAJENG	33.547	34.336	67.883
4	BAJENG BARAT	11.972	12.616	24.588
5	PALLANGGA	57.852	59.263	117.115
6	BAROMBONG	19.128	19.606	38.734
7	SOMBA OPU	78.405	79.043	157.448
8	BONTOMARANNU	17.097	17.356	34.453
9	PATTALLASSANG	11.885	11.867	23.752

10	PARANGLOE	8.847	9.271	18.118
11	MANUJU	7.183	7.669	14.852
12	TINGGIMONCONG	11.693	11.928	23.621
13	TOMBOLO PAO	14.641	14.209	28.850
14	PARIGI	6.020	6.777	12.797
15	BUNGAYA	7.827	8.442	16.269
16	BONTOLEMPANGAN	5.911	6.601	12.512
17	TOMPOBULU	13.862	14.886	28.748
18	BIRINGBULU	15.460	16.374	31.834
TOTAL		355.381	367.321	722.702

Sumber: BPS Kabupaten Gowa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
 M A K A S S A R
Tabel 4. 2
Perkembangan dan Kualitas Pegawai
Data Pegawai

NO	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	23	
2	Pegawai Tidak Tetap Umum	2	
3	Pegawai Tidak Tetap Khusus	-	
	Jumlah	25	

Tabel 4. 3
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

NO	Pendidikan Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	4	
2	Strata 1	17	
3	Diploma III	1	
4	SLTA/Sederajat	1	
	Jumlah	23	

Sumber: Arsip BPBD

Gambaran asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 4.4
Gambaran Aset yang Dikelola Tahun 2012-2015

No	Nama Barang	Type/Merek/Bahan		Jumlah	Kondisi
1	Ambulance	Isuzu	Besi	1	Baik
2	Mobil Rescue	Isuzu D-Max Rodeo	Besi	1	Baik
3	Motor Trail	Kawasaki KLX 150	Besi	2	Baik
4	Perahu Karet	Slinger	Karet	1	Baik
5	Mesin Perahu	Mercury	Besi	1	Baik
6	Mesin Genset	BNPB	Besi	1	Baik
7	Water Treatment Portable	BNPB	Besi/Fiberglass	1	Baik
8	Tenda Posko	BNPB	Camvas	1	Baik
9	Tenda Pengungsi	BNPB	Camvas	3	Baik

10	Tenda Keluarga	BNPB	Camvas	12	Baik
11	PC Desktop	Acer	Fiber	1	Baik
12	Printer	Canon Pixma MP 287	Fiber	1	Baik
13	Veltbed	BNPB	Camvas	25	Baik
14	White Board	-	Kayu	1	Baik
15	Gergaji Mesin/Senso	BNPB	Besi	1	Baik
16	Gergaji Mesin-Beton	BNPB	Besi	1	Baik
17	HT (Handy Talky)	Icom IC. V80	Fiber	2	
18	SSB	Icom IC. M700	Besi	1	
19	RIG	Icom IC. 2200	Besi	1	
20	Lampu Penerangan	BNPB	Fiber/Kaca	5	
21	Solar Handle Lamp	BNPB	Fiber/Kaca	12	
22	Senter HID Search L	BNPB	Fiber/Kaca	1	

Sumber: Arsip BPBD Kabupaten Gowa

1. Protap Penanggulangan Bencana

1. Sebelum Terjadi Bencana

- a. Membuat peta rawan bencana dan menginformasikannya
- b. Menyiapkan potensi masyarakat/Linmas untuk penanggulangan bencana
- c. Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana
- d. Menetapkan daerah alternative pengungsian korban bencana
- e. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tertinggal di daerah rawan bencana

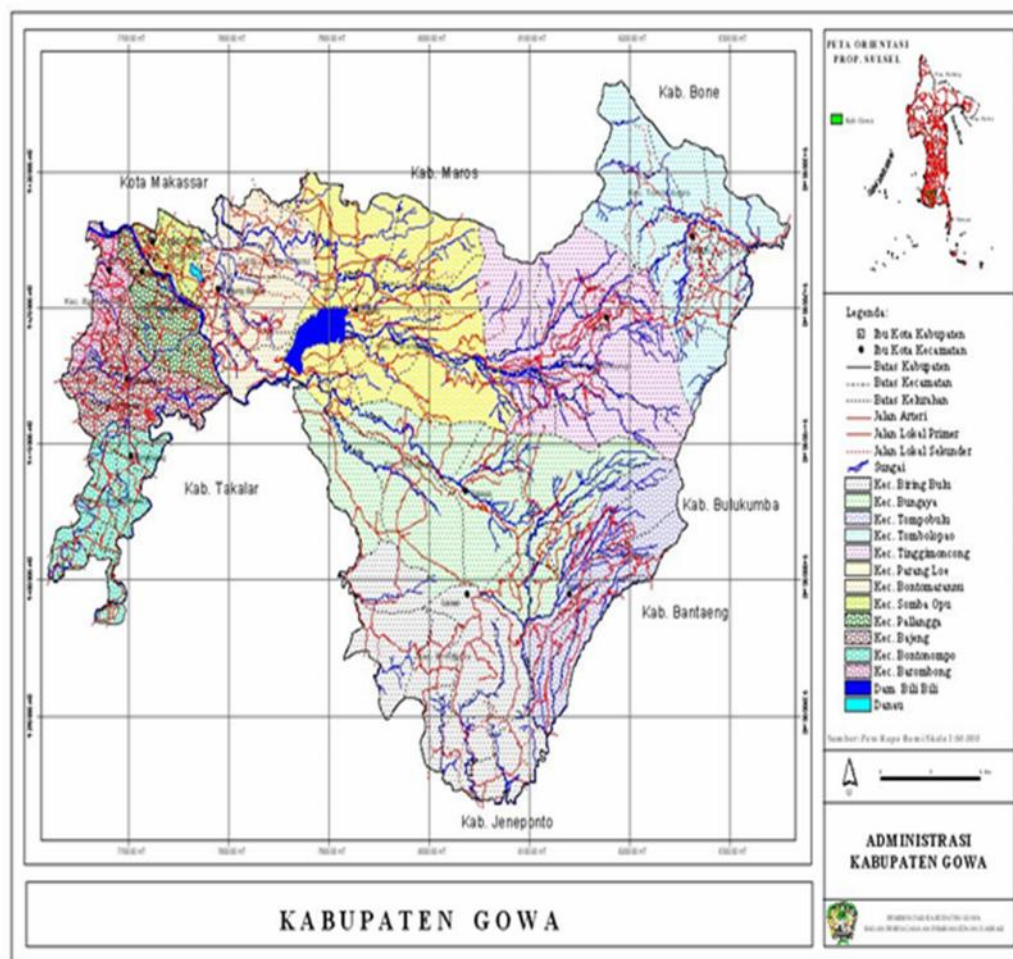
- f. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi dalam APBD.

2. Saat terjadi Bencana

- a. Mencari dan menyelamatkan korban
- b. Mengungsikan masyarakat terdampak bencana
- c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan tenaga medis, obat-obatan, makanan dan pakaian
- d. Menyiapkan dapur umum
- e. Mengamankan daerah/jalur terkena bencana
- f. Menerima, mengelola, dan menyalurkan bantuan
- g. Menggerakkan semua potensi yang ada di tingkat provinsi

3. Sesudah terjadi bencana

- a. Menginterview jumlah korban dan jumlah kerugian
- b. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah terdampak bencana
- c. Menempatkan kembali korban terdampak bencana kelokasi semula atau kedaerah yang aman
- d. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.



ALAUDDIN
MAKASSAR

B. Gambaran Umum Kabupaten gowa

1. Gambaran Wilayah Kabupaten Gowa

Wilayah Kabupaten Gowa meliputi 18 Kecamatan terdiri atas 167 Desa/Kelurahan yang sebagian besar memiliki kerawanan bencana yaitu, bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan beberapa jenis bencana lainnya. Bencana yang paling rawan dan luas areanya adalah bencana banjir yang diakibatkan melimpasnya air sungai jenneberang yang diakibatkan hujan yang terus menerus.

2. Letak Geografis kabupaten Gowa

Secara geografis, Kabupaten Gowa meliputi luas wilayah 1.833,33 km² atau 3,01 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan kecamatan yang memiliki luas paling besar adalah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,62 km² (14 % dari luas Kab. Gowa) sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Bajeng Barat dengan luas 19,04 km².

3. Demografi/ Batasan Kabupaten Gowa

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Kota Makassar;
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Kab. Sinjai, Bulukumba, dan

Bantaeng

- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Takalar dan Kota Makassar.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.

4. Iklim atau Cuaca

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November.

***C. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Penanggulangan
Bencana Banjir di Kabupaten Gowa***

Upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan untuk menanggulangi bencana banjir sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana banjir perlu disesuaikan dengan kondisi daerah yang sering terjadi bencana banjir.

Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana banjir yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara Nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Halim Hasyim, yaitu:

“Disini BPBD selaku kordinator yang di bentuk dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang terjadi”¹

Maka Didirikannya BPBD setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Gowa serius dalam penanggulangan bencana banjir yang sering melanda Kabupaten Gowa. Perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di daerah.

Upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan BPBD merupakan kegiatan atau peraturan dalam penanggulangan bencana banjir, berikut kutipan wawancara dengan Halim Hasyim:

¹ Halim Hasyim (53 Tahun) Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Gowa. Wawancara, 14 Desember 2016

“Di sini BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang ada di Kabupaten Gowa, terlebih dahulu harus bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir yang ada di Kabupaten Gowa”.²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diklasifikasikan bahwa BPBD Kabupaten Gowa sebelum terjadinya bencana banjir melakukan rapat kilat bersama Bupati untuk membentuk satu komando, apakah itu dari TNI, POLRI, atau BPBD sendiri. Jadi pada saat terjadi bencana banjir maka semua tim yang sudah di bentuk langsung mengevakuasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan hasil wawancara yang senada dengan Muh. Arfah dan Halim Hasyim, yaitu:

“Di dalam penanggulangan bencana banjir, harus terlebih dahulu mendirikan tenda/posko sesuai dengan yang bertanggung jawab atau yang diamanahkan pada saat rapat, misalnya dapur umum itu bertanggung jawab dari dinas sosial, penanganan kesehatan yang bertanggung jawab yaitu dinas kesehatan dan PMI, masalah kendaraan di tangani oleh dinas perhubungan.”³

Setelah terjadi bencana dan semua data dalam posko terkumpul barulah dilakukan tindakan selanjutnya. Dalam posko ada data yang mengungkap bahwa sekian yang di efakuasi dan luka itu semua sudah ditangani secara profesional sehingga pada saat menolong itu semua tidak acak-acakan atau hanya sekedar menolong saja. Dalam melakukan tugas penanggulangan bencana banjir memang dibutuhkan kerjasama dengan instansi yang ada di daerah agar semua masalah yang terkena bencana banjir dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

² Halim Hasyim (53 Tahun), Kepala seksi kesiap-siagaan BPBD kabupaten Gowa, Wawancara. Sungguminasa, 14 Desember 2016

³ Halim Hasyim dan Muh. Arfah, Pegawai Dinas BPBD Kabupaten Gowa, Wawancara, 14 Desember 2016

Adapun upaya yang terstruktur dilakukan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten gowa dalam mengantisipasi segera terjadinya dan kemungkinan tidak terjadinya bencana banjir di Kabupaten Gowa.

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan dan memaparkan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Gowa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam proses transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara bersama Hj Aminah Rasiman:

“Melakukan sosialisasi dalam rangka mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang akan terjadi di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Kegiatan ini biasanya dilakukan hanya sekali dalam setahun sebelum terjadinya bencana banjir”.⁴

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di bulan November lalu tahun 2016 yang bertempat di lapangan Syekh Yusuf. Kegiatan kesiapsiagaan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir di bulan Desember atau pada saat terjadinya hujan lebat. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan semua instansi yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik itu pemerintah daerah, non pemerintah dan, selain itu masyarakat Kabupaten Gowa juga hadir dalam acara sosialisasi dalam acara kesiapsiagaan dan dalam penanggulangan

⁴ Hj. Aminah Rasiman, (53 Tahun), Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengegahan BPBD, Wawancara. Sungguminasa, 15 Desember 2016.

bencana terutama daerah yang rawan terjadinya bencana banjir yang ada di Kabupaten Gowa.

b. Kontinjensi

Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.⁵

Perencanaan kontinjensi juga dimaksud suatu proses perencanaan kedepan dalam keadaan yang tidak menentu. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Halim Hasim yaitu:

“Perencanaan kontinjensi pada kesiapsiagaan bencana yaitu suatu proses yang mengarah pada suatu kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan kejadian bencana sehingga dapat mencegah bencana, mengurangi dampak bencana, dan memulihkan diri dari dampak”.⁶

Pada saat ada tanda-tanda akan terjadinya bencana banjir maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap kecamatan. Aktivitas rencana kontinjensi dilaksanakan setelah terdapat tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana banjir yang diakibatkan melimpasnya air sungai atau meluapnya genangan air yang diakibatkan hujan yang

⁵ Arsip BPBD Kabupaten Gowa, 2016

⁶Halim Hasim (53 Tahun), Kepala Seksi Kesiap-siagaan BPBD, *Wawancara*. Sungguminasa, 19 Desember 2016

terus menerus selama beberapa hari yang menyebabkan banjir genangan air di 8 kecamatan di Kabupaten Gowa.⁷

c. Gladi Lapang

Pada dasarnya gladi lapang dilaksanakan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang nyata dengan maksud untuk menguji. Gladi lapang tanggap bencana merupakan alat atau instrument untuk menguji tingkat pengetahuan pemahaman, respon, dan tindakan warga ketika akan, saat dan pasca terjadi bencana.⁸

Adapun maksud diadakannya gladi lapang. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Halim Hasim, yaitu:

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 2) Mendorong peningkatan kapasitas warga dan pemerintah Desa/kelurahan dalam melakukan tindakan antisipasi menghadapi bencana
- 3) Memberikan keterampilan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan dalam menghadapi bencana.⁹

Adapun tujuan diadakannya gladi lapang yaitu:

- 1) Masyarakat dan pemerintah aparat Desa/kelurahan mempunyai keterampilan dalam menghadapi bencana banjir.
- 2) Masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan mempunyai kapasitas yang lebih memadai dalam menghadapi bencana banjir.

⁷ Arsip BPBD Kabupaten Gowa

⁸ *Arsip BPBD Kabupaten Gowa 2016*

⁹ Halim Hasyim (53 Tahun), Kepala Seksi Kesiap-siagaan BPBD, *Wawancara*. Sungguminasa, 19 Desember 2016

- 3) Masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai keterampilan dalam menghadapi bencana banjir.
- 4) Komponen infrastruktur berfungsi sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana banjir

Adapun tahapan gladi lapang dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu:

a. Fase I:

- 1) Kejadian bencana diumumkan oleh kepala daerah berdasarkan masukan dari BPBD
- 2) Petunjuk komandan tanggap darurat
- 3) Komandan tanggap darurat menyusun komando tanggap darurat

b. Fase II:

Komando tanggap darurat menjalankan operasi tanggap darurat selama masa tanggap darurat.

c. Fase III:

Selesainya masa tanggap darurat

Sebelum melakukan simulasi terlebih dahulu harus diketahui mengenai tanggap darurat dalam situasi kebencanaan banjir. Dalam penanggulangan bencana diprioritaskan penyelamatan jiwa dan perbaikan sarana prasarana.

Strategi penanganan darurat bencana merupakan cara untuk mencapai tujuan tanggap darurat yang telah ditetapkan. Strategi harus mampu mewadahi kegiatan

yang akan dilakukan masing-masing sektor sesuai dengan sifat/karakteristik bidang tugas sektor.¹⁰

D. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa, yaitu:

- a. Faktor Penghambat External Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa yaitu:

1. Belum Meningkatnya Kapasitas Masyarakat

Belum meningkatnya kapasitas masyarakat yang dimaksud di sini adalah kapasitas masyarakat yang belum memiliki kapasitas yang tangguh untuk menghadapi terjadinya bencana banjir, dan mampu menangani kedaruratan terutama untuk menolong dirinya sendiri yang terkena dampak bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gowa.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Muh. Arfah sekretaris BPBD yaitu:

“Masyarakat Kabupaten Gowa memang kurang memahami cara kesiapsiagaan menanggapi bencana banjir yang pernah terjadi di Kabupaten Gowa ini”.¹¹

¹⁰ Arsip BPBD Kabupaten Gowa.

¹¹ Muh. Arfah (55 Tahun), Sekretaris BPBD Kabupaten Gowa, Wawancara Sungguminasa, 21 Desember 2016

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dapat diketahui bahwa dalam teori manajemen bencana adalah upaya yang sistematis dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir secara cepat dan tepat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan oleh banjir.

2. Alat Penanggulangan Bencana Kurang Lengkap

Alat penanggulangan bencana sebagai alat penunjang keberhasilan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa. Apabila alat yang dibutuhkan tidak lengkap atau tidak tersedia maka dalam penanggulangan bencana banjir tidak akan memadai. Maka dari itu kurangnya alat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gowa. Adapun hasil wawancara bersama Hj. Aminah Rasiman yang sebagai pegawai di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Gowa, Yaitu:

“Alat yang ada di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) ini tidak lengkap atau tidak memadai untuk digunakan dalam penanggulangan bencana banjir, karena apabila ada terjadi bencana biasanya alat yang digunakan itu biasanya tidak kembali lagi di instansi tersebut”.¹²

Senada yang diutarakan Halim Hasyim, bahwa:

“Alat yang digunakan pada saat melakukan pertolongan apabila terjadi bencana banjir di Kabupaten Gowa ini kurang lengkap atau kurang memadai yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disebabkan karena apabila ada terjadi bencana banjir semua alat yang sudah digunakan pada saat penanggulangan itu biasanya tidak kembali lagi ke instansi ini karena tidak diperhatikan lagi, itupun biasanya kembali hanya sebagian”.¹³

¹² Hj. Aminah Rasiman, (53 Tahun), Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengegahan BPBD, Wawancara. Sungguminasa, 19 Desember 2016

¹³ Halim Hasyim (53 Tahun), Kepala Seksi Kesiap-siagaan BPBD, Wawancara. Sungguminasa, 19 Desember 2016

Alat yang digunakan dalam penanggulangan bencana banjir yang ada di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yaitu terdiri atas satu unit tenda pengungsi, satu unit perahu karet, satu mobil ambulance dan mobil serbaguna.

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa peralatan yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak lengkap untuk digunakan pada saat penanggulangan bencana banjir.

3. Kurangnya Dana

Sesuai dengan hasil Wawancara bersama Halim Hasyim, yaitu:

“Salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gowa ini yaitu kurangnya dana dari pemerintah, sehingga dalam penanggulangan bencana banjir itu biasanya kurang memadai”.¹⁴

Jadi, penanggulangan bencana banjir biaya operasionalnya saat tanggap darurat terlebih dahulu dapat dimanfaatkan dana SKPD masing-masing. Jika dana kurang memadai, dimintakan kepada provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi. Selanjutnya, jika belum bias diatasi maka bisa diusulkan dana siap pakai/”ON CALL” dapat di minta melalui BNPB setelah ada pernyataan Tanggap Darurat secara resmi dan tertulis dari Bupati.

b. Faktor Penghambat Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Halim Hasyim, menyatakan bahwa:

¹⁴Halim Hasyim, (53 tahun), Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD, Wawancara, Sungguminasa, 26 Desember 2016

“Yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa ini yaitu kurangnya personil terutama di bagian seksi Kesiapsiagaan.”¹⁵

Jumlah personil yang ada di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yaitu 27 orang secara keseluruhan. Adapun jumlah personil di bagian Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan yaitu terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi pencegahan, dan seksi kesiapsiagaan.

Jadi di dalam melakukan penanggulangan bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus membentuk atau menambah personil untuk bagian pencegahan dan kesiapsiagaan terutama di bagian seksi kesiapsiagaan agar pada saat terjadi bencana banjir di Kabupaten Gowa itu tidak terhambat lagi di bagian sumber daya manusianya (personil).



¹⁵ Halim Hasim (53 Tahun), Kepala Seksi Kesiap-siagaan BPBD, *Wawancara*. Sungguminasa, 22 Desember 2016

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan beberapa informan, penelitian di lokasi dan beberapa dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan bagus karena upaya-upaya BPBD dilaksanakan setiap tahunnya dan sudah melibatkan pemerintah Kabupaten Gowa dan masyarakat kabupaten Gowa yang sering terkena bencana banjir setiap tahunnya.
2. Upaya-upaya BPBD Kabupaten Gowa adalah upaya yang sudah tersusun secara struktur dan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir yang akan segera terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi. Adapun upaya-upaya BPBD yang sudah tersusun secara struktur, yaitu:
 - a. Sosialisasi
 - b. Kontinjensi
 - c. Gladi Lapang
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor penghambat BPBD dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya dana dari pemerintah sehingga dalam penanggulangan bencana banjir biasanya kurang efektif dan lambat di tangani oleh pemerintah BPBD
- b. Kurangnya alat yang tersedia di instansi BPBD khususnya alat yang digunakan pada saat melaksanakan pertolongan pada saat terjadi bencana banjir
- c. Kurangnya SDM atau personil di bagian bidang kesiapsiagaan atau pencegahan bencana yang ada di BPBD Kabupaten Gowa

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun implikasi dalam penelitian, adalah:

1. Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), harus tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya dan tetap konsisten dalam menjaga prinsip BPBD mengenai bencana yang terjadi di Kabupaten Gowa.
2. Upaya BPBD yang telah dilakukan agar lebih diperhatikan dan dikembangkan kepada masyarakat Kabupaten Gowa khususnya kepada daerah dan masyarakat yang sering terjadi bencana banjir yang ada di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, *Siap Siaga Menghadapi Bencana Alam*, (Bandung, c.3, 2013)
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet, II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet: 8, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, (Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial, 2007)
- Departemen Sosial RI, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2003)
- Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Cet.1, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Kementerian Sosial RI, *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*, (Cet.I: Jakarta, 2011)
- Kementerian Sosial RI, *Himpunan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Bidang Sosial*.

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007)

Nurjannah, dkk, *Manajemen Bencana*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi, *Panduan Pengenalan Karakteristik bencana dan Upaya Mitigasi di Indonesia*

Usman Jasad, *Dakwah dan Komunikasi Transformatif*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2011)

Widiyany Nurrahmah, *Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Banjir*, (Cet. I; Jakarta 2011)

<http://www.slideshare.net/DwinaAvianindya/makalah-kesiapsiagaan-banjir>.

<Http://bpbd.pemkomedan.go.id/statis-7-tugas-dan -fungsi.html>

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 7 Desember 2016

K e p a d a

Nomor : 070/2219/BKB.P/2016
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Gowa
Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 15322/S.01.P/P2T/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Karmila**
Tempat/Tanggal Lahir : Bikeru, 26 Maret 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Rappokalling Timur Lr.3 No.8C

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Laporan dan Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GOWA**"

Selama : 13 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.


An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,
KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NTP : 19590205 198003 1 013

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Peninggal;

Nomor : B-8205/DU.I/PP.009/12 /2016
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata-Gowa, 6 Desember 2016

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala UPT, P2T, BKPM, Prov. Sul-Sel
Di -`
Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Karmila
NIM : 50300113015
Tingkat/Semester : VII (Tujuh)
Fakultas/Jurusan : Dakwah & Komunikasi/PMI Kessos
Alamat : Jl. Rappokalling Timur Lrg.3 No. 8 C

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Bencana Banjir di Kabupaten Gowa**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Dosen pembimbing : 1. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si

2. Drs. H. Syakhrudin DN, M.Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di **Kabupaten Gowa** dari tanggal 13 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Demikian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

An Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik


Dr. H. Misbahuddin, M.Ag
NIP. 19701 208 200031 001

Tembusan

- 1) Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai) Laporan
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan
- 3) Arsip



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 5 7 4 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 15322/S.01P/P2T/12/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

Berdasarkan surat Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor : B.8205/DU.I/TL.00/11/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : KARMILA
Nomor Pokok : 50300113015
Program Studi : PMI-Kessos
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Desember 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Peringgal.

SIMAP BKPMD 07-12-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provulsul@yahoo.com
Makassar 90222



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 617 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA UJIAN / DEWAN MUNAQISY SKRIPSI
AN. KARMILA NIM: 50300113015
JURUSAN PMI KONS. KESSOS

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, setelah :

Membaca : a. Surat Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

N a m a : **Karmila**

Jurusan : **PMI Kons. Kessos**

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah siap untuk menempuh Ujian/ Munaqasyah Skripsi dengan judul:

"Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa" studi mahasiswa tersebut, dipandang perlu menetapkan Panitia/ Dewan Munaqisy;

b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas ujian/ munaqasyah skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 57 Tahun 2005 tentang *Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 85 Tahun 2013 tentang *Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan*;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang *perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar*;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014 tentang *Statuta UIN Alauddin Makassar*;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor : 129.C Tahun 2013 tentang *Pedoman Edukasi UIN Alauddin*.

Memperhatikan : Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: 53 Tahun 2016 tentang *Kalender Kegiatan Akademik Tahun 2016/2017*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA UJIAN/DEWAN MUNAQISY SKRIPSI AN. KARMILA NIM: 50300113015 JURUSAN PMI KONS. KESSOS
- Pertama : Mengangkat Panitia Ujian/Dewan Munaqisy Skripsi A.n. Karmila Nim: 50300113015 Jurusan PMI Kons. Kessos yang personalianya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Panitia Ujian/ Dewan Munaqisy bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan ujian terhadap mahasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 30 MARET 2017

Dekan,

Kuasa No. B-1940/DU.II/KP.07.6/03/2017

Tanggal 15 Maret 2017



Dr. H. Mahmuddin, M.Ag

NIP. 19621217 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Ketua Jurusan PMI Kons. Kessos Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 617 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 MARET 2017

TENTANG

PANITIA UJIAN/ DEWAN MUNAQISY SKRIPSI
AN. KARMILA NIM: 50300113015
JURUSAN PMI KONS. KESSOS

Penanggungjawab	: Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Ketua	: Dra. St. Aisyah. BM., M.Sos.I
Sekretaris	: Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag
Pembimbing I	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si
Pembimbing II	: Drs. H. Syakhruddin. DN., M.Si
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., MM
Munaqisy II	: Dr. Syamsuddin. AB, S.Ag., M.Pd
Pelaksana	: Suharyadi, S.HI

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 30 MARET 2017

Dekan,

Kuasa No. B-1940/DU.II/KP.07.6/03/2017

/ Tanggal 15 Maret 2017



Dr. H. Mahmuddin, M.Ag

NIP. 19621217 198803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ■ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ■ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-2154/DU.I/PP.10.1/03/2017

Samata Gowa, 30 Maret 2017

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Kepada Yth.

1. Ketua Sidang
2. Sekretaris Sidang
3. Pembimbing I dan II
4. Penguji Ujian Munaqasyah I dan II
5. Pelaksana

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi saudara An. Karmila Nim: 50300113015 Jurusan PMI Kons. Kessos dengan judul: "**Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa**", maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri ujian tersebut, yang Insya Allah pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2017

Waktu : Pukul 13.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Dekan

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Kuasa No. B-1940/DU.II/KP.07.6/03/2017

Tanggal 15 Maret 2017

Dr. H. Mahmuddin, M.Ag

NIP. 19621217 198803 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Profesi/Jabatan :

Umur :

Alamat :

B. Pertanyaan Peneliti:

A. Bagaimana Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa?

1. Apa upaya BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa?
2. Apakah BPBD sudah efektif dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi Kabupaten Gowa?

B. Apa Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa?

1. Apa faktor yang menjadi penghambat BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa?
2. Apa yang harus dilakukan BPBD agar faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir biasantisipasi sebelumnya?

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Penulis | : Karmila |
| Profesi/Status | : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar |
| Fakultas/Jurusan | : Dakwah dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Alamat | : Jl. Rappokalling Timur Lr.03 No 8c |
| 2. Nama Informan | : <u>Pak. Halim</u> |
| Profesi/Jabatan | : <u>kepala seksi kesatuan</u> |
| Umur | : <u>53 Tahun</u> |
| Alamat | : <u>Jl. Al. Jibra</u> |


Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 13 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa
Makassar, 21 Desember 2016

Informan


.....
Halim

Penulis


.....
Karmila
NIM: 50300113015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

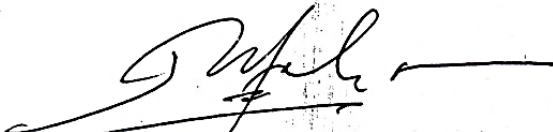
1. Nama Penulis : Karmila
Profesi/Status : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Rappokalling Timur Lr.03 No 8c

2. Nama Informan : Muh. Arfah
Profesi/Jabatan : Sekertans BPBD kab. Gowa
Umur : 55 thn
Alamat : RTM Aurah

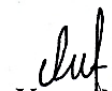
Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 13 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa
Makassar, 19 Desember 2016

Informan


Muh. Arfah

Penulis


Karmila
NIM: 50300113015

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

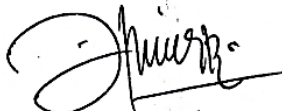
1. Nama Penulis : Karmila
Profesi/Status : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Rappokalling Timur Lr.03 No 8c

2. Nama Informan : Hj. Aminah
Profesi/Jabatan : kabid kesiapsiagaan dan pencegahan
Umur : 53 th.
Alamat : BTN Tamannang Indah I Bt No.18

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 13 Desember 2016 s/d 13 Januari 2017, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa
Makassar, 15 Desember 2016

Informan



Dra. Hj. Aminah Rasman MM

Penulis



Karmila
NIM: 50300113015

DOKUMENTASI



Wawancara berasama Muh. Arfah
Sekertaris BPBD Kabupaten Gowa
Umur 55 Tahun
Alamat: BTN Aurah



Wawancara Bersama Hj. Aminah Rasiman
Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan
Umur 53 Tahun
Alamat BTN Tamarunang Indah 1/BF No.18



Wawancara Bersama Halim Hasyim
Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kab. Gowa
Umur 53 Tahun
Jl. Al Jibra



Pengambilan Data Profil BPBD Kab. Gowa



Mobil Ambulance BPBD Kabupaten Gowa



Mobil Truk Serba Guna Milik BPBD Kabupaten Gowa



Tenda Untuk Pengungsi Korban Bencana



[illegible]

Peta Administrasi Kecamatan Bontomarannu

Kecamatan Sombaopu

Kecamatan Pattalassang

Kecamatan Parangloe

Kecamatan Pallangga

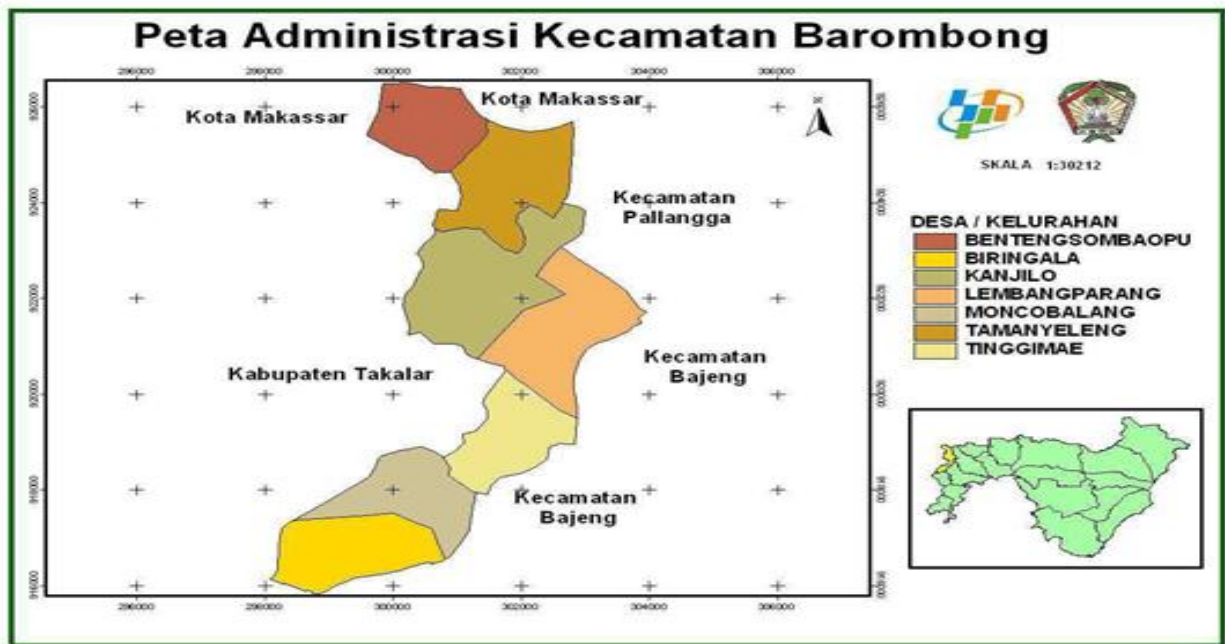
Kabupaten Takalar

DESA / KELURAHAN

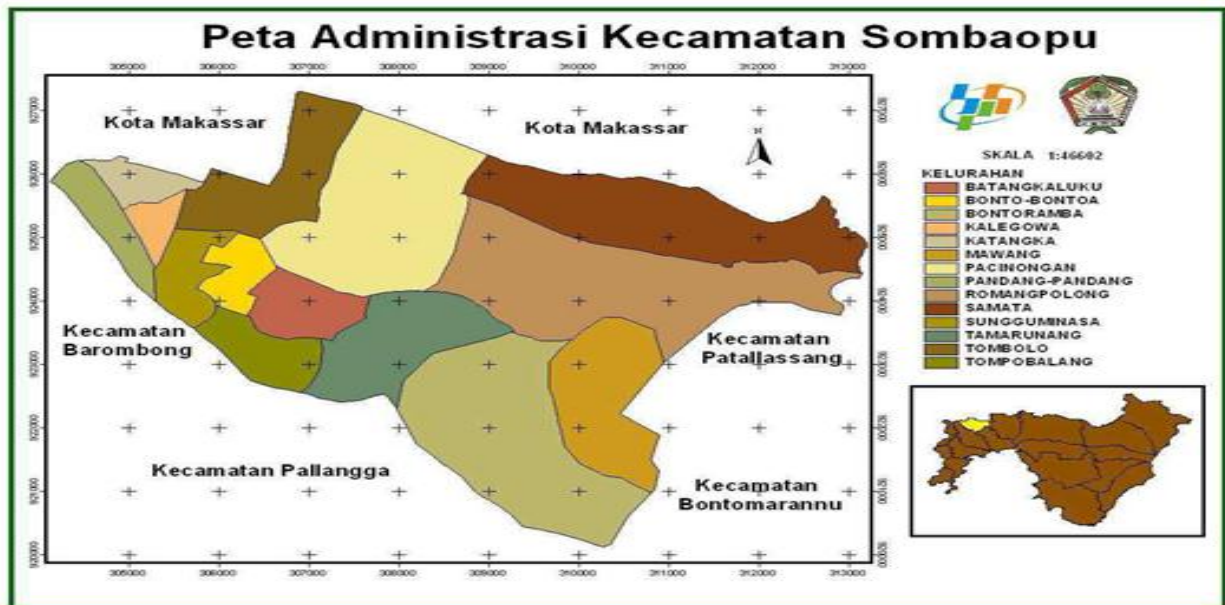
- BILI BILI
- BONTOMANAI
- BORONGLOE
- MATA ALLO
- NIRANNUANG
- PAKKATTO
- ROMANGLOE
- ROMANGLOMPOA
- SÖKKOLIA

SKALA 1:50381

PETA RAWAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN BAROMBONG



PETA RAWAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SOMBAOPU



RIWAYAT HIDUP



Karmila dilahirkan, di Bikeru 26 Maret 1996 penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, buah hati dari ibunda Rabiah dan ayahanda Abd. Azis. Penulis memulai pendidikan di SDN 55 Kaherrang Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Sinjai Selatan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2013. Sejak SMA penulis selalu aktif di ekstrakurikuler bagian keolahragaan dan Palang Merah Indonesia (PMI). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial dan selesai pada tahun 2017.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis pernah aktif di berbagai lembaga kemahasiswaan yang bersifat intra maupun ekstra kampus. Pada tahun 2013 masuk pada organisasi daerah di IKMS (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai) pada tahun 2013 sampai sekarang. Pada tahun 2015 bergabung menjadi anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kompi UIN Alauddin Makassar, dan pernah menjadi salah satu anggota Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada tahun 2015 sampai 2016. Untuk memperoleh gelar sarjana sosial penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gowa.